

BAB II

TRANS PAKUAN BOGOR DAN POTRET TRANSPORTASI PUBLIK DI KOTA BOGOR

2.1 Gambaran Umum Kota Bogor

2.1.1 Profil Kota Bogor

Kota Bogor merupakan salah satu kota yang berada di Provinsi Jawa Barat. Sebelum dikenal dengan nama “Bogor”, pada masa kolonial Belanda kota ini disebut *Buitenzorg*, yang dalam bahasa Belanda berarti “tanpa kekhawatiran”. Nama tersebut diberikan karena Kota Bogor pada masa itu dijadikan sebagai tempat peristirahatan bagi para pejabat kolonial. Pada masa yang sama, dibangun pula Istana Bogor, yang hingga kini masih digunakan sebagai salah satu tempat peristirahatan Presiden Republik Indonesia ketika berada di Kota Bogor.

Kota Bogor ditetapkan sebagai Kawasan Strategi Nasional dari sudut pandang ekonomi berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2020 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kawasan Perkotaan Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi, Puncak, dan Cianjur (Jabodetabekpunjur). Kawasan ini terbagi menjadi Kawasan Perkotaan Inti dan Kawasan Penyangga di sekelilingnya yang membentuk suatu kawasan metropolitan.

Selain itu, dengan curah hujan yang tinggi di Kota ini mendukung pula pada tingginya keanekaragaman hayati. Kondisi tersebut menjadikan Kota Bogor sebagai salah satu pusat penelitian di bidang pertanian dan kehutanan. Sejalan

dengan perkembangannya, Pemerintah Kota Bogor berkomitmen untuk mewujudkan pembangunan kota yang modern, ramah teknologi, partisipatif, serta berbudaya.

Untuk mendukung terwujudnya pembangunan yang berkelanjutan, Pemerintah Kota Bogor memiliki visi dan misi yang menjadi landasan utama dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik.

Visi : Bogor Beres, Bogor Maju

Misi :

1. **Bogor Cerdas** - Memastikan ketersediaan dan akses pendidikan yang merata, terjangkau, berkelanjutan, serta berkeadilan bagi seluruh masyarakat.
2. **Bogor Sehat & Sejahtera** - Meningkatkan kualitas layanan kesehatan dan kesejahteraan sosial untuk seluruh warga.
3. **Bogor Lancar** - Mewujudkan sistem transportasi dan infrastruktur yang efisien guna mendukung mobilitas dan aktivitas ekonomi masyarakat

2.1.2 Kondisi Geografis

Gambar 2.1 Peta Kota Bogor



Sumber: Kota Bogor Dalam Angka, 2024

Kota Bogor secara geografis terletak di antara $106^{\circ}43'30''$ – $106^{\circ}51'00''$ BT dan $6^{\circ}30'30''$ – $6^{\circ}41'00''$ LS, dengan ketinggian berkisar antara 190 hingga 350 meter di atas permukaan laut. Kota Bogor berjarak kurang lebih 56 km dari Selatan Jakarta, dengan luas wilayahnya mencapai 11.850 Ha. Letak Kota Bogor terbilang strategis karena berada di tengah Kabupaten Bogor serta termasuk ke dalam wilayah aglomerasi Jakarta. Posisi ini menjadikan Kota Bogor sebagai bagian dari Kawasan Strategis Nasional dan berperan sebagai kota penopang Ibu Kota. Sebagai wilayah penopang Ibu Kota, Kota Bogor juga berfungsi menunjang layanan serta menjadi pusat aktivitas transportasi, pariwisata, komunikasi, industri, dan perdagangan.

Karena curah hujannya yang tinggi, Kota Bogor juga mendapat julukan “Kota Hujan”. Kondisi ini terjadi akibat letak geografis yang berada di kaki Gunung Salak dan Gunung Pangrango. Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Bogor, rata-rata curah hujan tahunan mencapai 404,83 mm. Sementara itu, suhu udara tahunan di Kota Bogor berkisar antara 26,1°C hingga 27,3°C, dengan suhu terendah 18,6°C pada bulan Juli dan suhu tertinggi 35,9°C pada bulan Oktober. Tingkat kelembapan udara juga relatif tinggi, yakni antara 72,20% hingga 86,30%.

Kemudian apabila dilihat dari segi administratif, Kota Bogor dibagi menjadi enam kecamatan, yaitu Bogor Selatan, Bogor Utara, Bogor Timur, Bogor Barat, Bogor Tengah, dan Tanah Sereal. Kota Bogor juga mencakup 68 kelurahan. Luas wilayah Kota Bogor dibagi menurut kecamatan ditunjukkan pada tabel 2.1.

Tabel 2.1 Luas Wilayah menurut Kecamatan di Kota Bogor Tahun 2024

No.	Kecamatan	Luas Wilayah (km ²)
1.	Bogor Selatan	30,50
2.	Bogor Timur	10,46
3.	Bogor Utara	18,14
4.	Bogor Tengah	8,37
5.	Bogor Barat	23,32
6.	Tanah Sereal	20,60

Sumber: Diolah Peneliti, Badan Pusat Statistik Kota Bogor

Adapun secara kewilayahan, Kota Bogor memiliki batas yang langsung bersinggungan dengan beberapa kecamatan di Kabupaten Bogor. Di sebelah Barat berbatasan dengan Kecamatan Dramaga dan Ciomas, lalu sebelah timur berbatasan dengan Kecamatan Sukaraja dan Ciawi. Di bagian utara berbatasan dengan Kecamatan Kemang, Bojong Gede, serta Sukaraja, dan yang terakhir sebelah selatan yaitu berbatasan langsung dengan Kecamatan Cijeruk dan Caringin.

2.1.3 Kondisi Demografi

Kota Bogor menjadi salah satu wilayah dengan pertumbuhan yang relatif tinggi di Jawa Barat. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) Tahun 2024, total jumlah penduduk di kota ini tercatat sebanyak 1.078.351 jiwa. Jumlah tersebut tidak tersebar secara merata di setiap kecamatan. Terdapat kesenjangan yang cukup signifikan, di mana Kecamatan Bogor Barat merupakan wilayah dengan total penduduk paling banyak, sedangkan pada Kecamatan Bogor Tengah terdapat total penduduk yang relatif lebih sedikit. Informasi mengenai jumlah penduduk per kecamatan di Kota Bogor disajikan pada tabel di bawah.

Tabel 2.2 Jumlah Penduduk menurut Kecamatan di Kota Bogor Tahun 2024

No.	Kecamatan	Jumlah Penduduk
1.	Bogor Selatan	212.423
2.	Bogor Timur	107.573
3.	Bogor Utara	192.430
4.	Bogor Tengah	95.758
5.	Bogor Barat	241.738
6.	Tanah Sereal	228.429
Jumlah		1.078.351

Sumber: Diolah Peneliti, Badan Pusat Statistik Kota Bogor

Berdasarkan tabel 2.2, Kecamatan Bogor Barat merupakan wilayah dengan jumlah penduduk tertinggi di Kota Bogor, yakni sebanyak 241.738 jiwa atau sekitar 22,42% dari total populasi. Sementara itu, Kecamatan Tanah Sereal berada di urutan kedua dengan jumlah penduduk 228.429 jiwa atau sebesar 21,18%. Selanjutnya, Kecamatan Bogor Selatan memiliki jumlah penduduk sebanyak 212.423 jiwa atau sekitar 19,70%.

Kecamatan Bogor Utara tercatat memiliki jumlah penduduk 192.430 jiwa atau sebesar 17,84%. Di sisi lain, Kecamatan Bogor Timur memiliki penduduk sebanyak 107.573 jiwa atau sekitar 9,97%. Adapun kecamatan dengan populasi paling sedikit adalah Bogor Tengah, dengan total 95.758 jiwa atau sebesar 8,88% dari jumlah penduduk Kota Bogor secara keseluruhan.

Dari segi kepadatan penduduk, Kota Bogor juga memiliki angka rata-rata yang cukup tinggi, yaitu sekitar 9.680 jiwa/km². Angka ini menunjukkan bahwa

Kota Bogor termasuk wilayah perkotaan dengan konsentrasi penduduk yang padat jika dibandingkan dengan rata-rata Jawa Barat. Kecamatan Bogor Tengah memiliki kepadatan tertinggi, yaitu 11.437 jiwa/km², meskipun jumlah penduduknya paling sedikit. Hal ini disebabkan oleh luas wilayahnya yang relatif kecil. Selain itu, Kecamatan Tanah Sereal (11.090 jiwa/km²) dan Bogor Utara (10.609 jiwa/km²) juga memiliki kepadatan yang tinggi. Sebaliknya, Kecamatan Bogor Selatan menyandang sebagai kepadatan penduduk paling rendah, yakni 6.962 jiwa/km², dipengaruhi oleh luas wilayahnya yang merupakan yang terbesar di Kota Bogor.

Sementara itu, *sex ratio* atau rasio jenis kelamin di Kota Bogor tercatat sebesar 103. Angka ini berarti terdapat sekitar 103 laki-laki untuk setiap 100 perempuan. Berdasarkan data BPS, jumlah penduduk laki-laki mencapai 545.945 jiwa, sedangkan penduduk perempuan sebanyak 532.406 jiwa. Data tersebut menggambarkan bahwa jumlah perempuan di Kota Bogor lebih sedikit dibandingkan jumlah laki-laki. Dengan demikian, kondisi demografis Kota Bogor pada tahun 2024 menunjukkan karakteristik wilayah perkotaan dengan jumlah penduduk yang besar, kepadatan relatif tinggi, serta komposisi gender yang seimbang.

2.2 Sejarah dan Perkembangan Biskita Trans Pakuan Bogor

Kota Bogor kerap dijuluki sebagai “Kota Seribu Angkot” karena wilayah ini memiliki jumlah angkutan kota (angkot) yang sangat banyak dan beroperasi hampir di seluruh penjuru kota. Berdasarkan data dari Dinas Perhubungan Kota Bogor, pada tahun 2021 tercatat sebanyak 3.242 unit angkot yang beroperasi. Keberadaan angkot di satu sisi menjadi moda transportasi yang paling diandalkan masyarakat, namun di sisi lain justru memunculkan persoalan baru, yaitu kemacetan lalu lintas. Hal ini disebabkan oleh perilaku sopir angkot yang sering mengetem di bahu jalan demi mencari penumpang. Melihat kondisi tersebut, Pemerintah Kota Bogor bersama Kementerian Perhubungan melalui Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek (BPTJ) menghadirkan layanan transportasi umum berbasis Bus Rapid Trans (BRT) dengan nama Biskita Trans Pakuan Bogor sebagai alternatif transportasi perkotaan.

Biskita Trans Pakuan mulai beroperasi pada tanggal 2 November 2021 dengan mekanisme subsidi *Buy The Service* (BTS). Pelaksanaan subsidi tersebut diatur melalui Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 9 Tahun 2020 tentang Pemberian Subsidi Angkutan Umum Perkotaan. Konsep layanan ini menyerupai Transjakarta, di mana bus hanya berhenti di halte pemberhentian atau bus stop, namun berbeda karena Biskita beroperasi tanpa jalur khusus. Sebagai upaya mengurangi jumlah angkot, Biskita hadir dengan sistem konversi 3:1, di mana setiap satu unit bus Biskita menggantikan tiga unit angkot. Sistem konversi ini juga diatur dalam Pasal 18 Peraturan Daerah Kota Bogor No. 8 Tahun 2023 tentang

Transportasi. Pada masa awal peluncurannya, tersedia 49 unit bus Biskita yang berhasil menggantikan 147 unit angkot yang dinilai sudah tidak layak beroperasi.

Gambar 2.2 Kondisi Interior Biskita Trans Pakuan Bogor



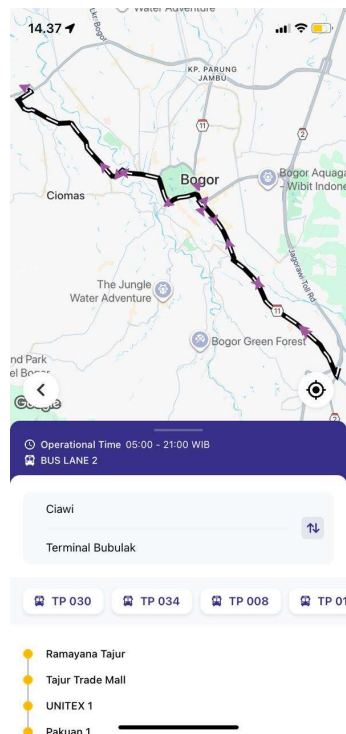
Sumber: Dokumentasi Peneliti, 2025

Dalam pelayanannya, Biskita Trans Pakuan dilengkapi berbagai fasilitas penunjang kenyamanan dan keamanan penumpang, seperti pendingin udara (AC), sabuk pengaman, pegangan tangan, *passenger counting system*, *GPS tracking*, kamera pengawas (*camera surveillance*), serta alat pemadam api ringan (APAR). Kapasitas bus mencapai 35 penumpang, terdiri dari 20 tempat duduk dan 15 berdiri. Jam operasional berlangsung mulai pukul 05.00 s/d 21.00. Selain itu, masyarakat juga dapat memantau posisi bus secara real-time melalui aplikasi Biskita Trans Pakuan, sehingga mempermudah mobilitas harian.

Pada perencanaannya, Biskita diproyeksikan melayani enam koridor, namun hingga Desember 2024 kemarin, hanya empat koridor yang terealisasi, yaitu koridor 1 (Terminal Bubulak–Cidangi), koridor 2 (Terminal Bubulak–

Ciawi via Cidangiang), koridor 5 (Terminal Ciparigi–Stasiun Bogor), dan koridor 6 (Parung Banteng–Air Mancur Bogor). Sementara itu, koridor 3 (Terminal Bubulak–Sukasari/Lawang Gintung) dan koridor 4 (Ciawi–Pomad/Ciparigi) masih belum beroperasi. Walaupun demikian, keberadaan empat koridor yang berjalan telah berkontribusi terhadap pengurangan jumlah angkot di Kota Bogor.

Gambar 2.3 Tangkapan Layar Aplikasi Biskita Trans Pakuan Bogor



Sumber: Dokumentasi Peneliti, 2025

Sejak peluncurannya, layanan Biskita mendapat sambutan positif dari masyarakat. Data dari BPTJ Kementerian Perhubungan mencatat peningkatan signifikan jumlah penumpang Biskita dari waktu ke waktu.

Tabel 2.3 Jumlah Penumpang Biskita Trans Pakuan Bogor Tahun 2024

Bulan	Jumlah Penumpang				
	Koridor 1	Koridor 2	Koridor 5	Koridor 6	Jumlah
Januari	70.837	106.739	55.822	24.703	258.101
Februari	68.991	105.954	50.852	23.165	248.962
Maret	67.546	107.416	49.044	21.521	245.527
April	60.400	101.733	48.054	18.934	229.121
Mei	76.586	122.183	56.029	25.037	279.835
Juni	68.138	114.883	51.108	21.642	255.771
Juli	72.568	122.571	58.917	25.262	279.318
Agustus	77.555	120.326	61.216	28.321	287.418
September	82.736	127.590	63.436	29.750	303.512
Oktober	89.473	135.530	66.367	31.376	322.746
November	83.839	132.607	62.406	28.690	307.542
Desember	70.600	123.315	53.105	22.956	269.976
Jumlah	889.269	1.420.847	676.356	301.357	3.287.829

Sumber: Diolah Peneliti, Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek (2024)

Tabel di atas menunjukkan bahwa pada Januari hingga Desember 2024, jumlah penumpang Biskita Trans Pakuan Bogor mencapai 3.287.829 orang. Angka ini mencerminkan tingkat antusiasme masyarakat yang cukup tinggi terhadap keberadaan transportasi publik berbasis bus di Kota Bogor. Dari seluruh koridor yang beroperasi, koridor 2 mencatat jumlah penumpang tertinggi karena memiliki rute terpanjang sehingga mampu menjangkau lebih banyak masyarakat.

Namun, penyelenggaraan Biskita tidak terlepas dari berbagai kendala. Sejak 1 Januari 2025, layanan ini sempat dihentikan sementara akibat berakhirnya skema subsidi *Buy The Service* (BTS) dari Kementerian Perhubungan. Kondisi tersebut menimbulkan keresahan di kalangan masyarakat yang selama ini mengandalkan Biskita sebagai sarana transportasi utama. Pada awalnya, Kepala Dinas Perhubungan Kota Bogor melalui Kompas (2022) menyampaikan bahwa penghentian layanan hanya akan berlangsung maksimal selama 30 hari kerja. Namun, karena keterbatasan anggaran dan belum ditemukannya skema pembiayaan baru sebagai pengganti subsidi BTS dari BPTJ Kemenhub RI, penghentian layanan berlangsung lebih lama dari perkiraan.

Setelah berhenti beroperasi selama kurang lebih empat bulan, pada 8 April 2025 Biskita Trans Pakuan kembali beroperasi dengan sumber pendanaan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Bogor. Dari sisi kelembagaan, Biskita saat ini belum berbentuk Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) maupun Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD). Pengelolaannya masih menjadi bagian dari kegiatan yang berada di bawah Organisasi Perangkat Daerah (OPD), yaitu Dinas Perhubungan Kota Bogor, sehingga seluruh operasionalnya belum ditangani oleh unit pengelola mandiri.

Skema tersebut membuat pendanaan layanan sepenuhnya bertumpu pada alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Walaupun demikian, Dinas Perhubungan tetap berkoordinasi dengan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) serta DPRD Kota Bogor untuk memastikan keberlanjutan alokasi

pembiayaan APBD setiap tahunnya agar operasional layanan dapat berjalan stabil. Selain itu, tim teknologi informasi (IT) Biskita masih bergantung pada dukungan pemerintah pusat karena keterbatasan fiskal daerah. Manajemen operasional pun masih diampu langsung oleh Dinas Perhubungan tanpa adanya unit manajerial tersendiri.